

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini telah menjawab rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang disusun. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017-2021.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017-2021.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017-2021.
4. Dana Desa (DD) mempengaruhi penurunan kemiskinan secara signifikan di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017-2021.

B. IMPLIKASI

Implikasi dari hasil analisis dan pembahasan di atas, antara lain:

1. DBH tidak memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi dan langkah-langkah perencanaan yang matang ke depan, atas pengalokasian DBH khususnya pada bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan prioritas dan porsi terbesar dalam pengalokasiannya, supaya implementasi kegiatan yang dibiayai oleh DBH lebih tepat manfaat dan optimal, selain itu juga perlu dirumuskan kembali regulasi yang dapat memberikan ruang bebas bagi Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat miskin yang belum tercover Jaminan Kesehatan Nasional, karena tidak menutup kemungkinan masih banyak terdapat masyarakat miskin yang belum menerima manfaat program dari BPJS. Disamping karena tidak dapat mengakses informasi terkait

program penanggulangan kemiskinan, kasus terbanyak dalam hal ini adalah karena ketidakvalidan Nomor Induk Kependudukan masyarakat yang menjadikan tidak terkover program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah,

2. DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan pengalokasian DAU yang lebih berpihak terhadap masyarakat miskin, supaya pengaruh DAU dapat menjadi signifikan pengaruhnya di tahun-tahun mendatang dalam menurunkan kemiskinan,
3. DAK tidak memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan, hal ini lebih disebabkan oleh serapan DAK Fisik yang kurang optimal serta kurangnya akses DAK Fisik dalam mengcover potensi-potensi yang dapat memunculkan kemiskinan baru yakni masyarakat terdampak bencana. Pemerintah Daerah perlu untuk mengevaluasi permasalahan tersebut supaya pengalokasian DAK mendatang dapat lebih optimal. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. meningkatkan serapan alokasi DAK Fisik dengan melakukan perencanaan dan koordinasi yang baik antar pihak. Pemerintah Daerah agar dapat menyiapkan Peraturan Kepala Daerah tentang SOP dan norma waktu pelaksanaan DAK Fisik baik dari segi pelaksanaan maupun prosedur lelangnya, serta menguatkan OPD yang menangani Unit Layanan Pengadaan agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan alokasi DAK tidak dapat dilaksanakan karena terlambat *upload* ataupun gagal lelang karena maladministrasi.
 - b. perlu dirumuskan agar kedepan alokasi DAK Fisik dapat digunakan untuk mengcover belanja kedaruratan pascabencana, seperti pengadaan tanah relokasi, pembangunan rekonstruksi rumah terdampak bencana, serta pemugaran Rumah Tidak Layak Huni terdampak bencana. Dengan adanya penyediaan fasilitas layanan dasar yang memadai dan tepat manfaat, diharapkan akan dapat menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

4. DD memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan, setidaknya Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu menjaga komitmen untuk mempertahankan sistem pengelolaan keuangan Desa yang sudah baik saat ini, serta perlu adanya inovasi dan terobosan-terobosan yang mampu mengoptimalkan Dana Desa agar lebih signifikan pengaruhnya dalam menekan angka kemiskinan di Desa, antara lain:
- a. Pemanfaatan tanah kas Desa untuk peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah serta peningkatan Pendapatan Asli Desa, dalam rangka mendukung program strategis nasional ketahanan pangan. Selama ini, Pemerintah Desa dalam menggunakan tanah kas Desanya lebih banyak digunakan pemanfaatannya untuk disewakan kepada masyarakat mampu yang notabene **nya dapat** untuk menyewa lahan dan menggarap kegiatan pertaniannya sendiri. Dengan adanya prioritas ketahanan pangan, Pemerintah Desa **didorong untuk dapat** memanfaatkan tanah kas desanya untuk melakukan kegiatan pertanian/perikanan/peternakan sendiri. Hal ini tentu akan **dapat meningkatkan** pendapatan asli desa lebih signifikan karena **hasil dari kegiatan tersebut 100% masuk rekening kas desa tanpa dikurangi biaya operasional**, sedangkan untuk pekerja dapat dibayarkan dengan **kegiatan padat karya tunai desa**.
 - b. sinergi yang baik antar *stakeholder* pengelolaan keuangan Desa, agar Dana Desa dapat lebih berpengaruh dalam menyukseskan pembangunan di Desa dalam mendukung tercapainya Desa tanpa kemiskinan yang tertuang dalam Dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa, baik dari unsur Pembina yang terdiri dari Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bupati; unsur pengawas dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintahan (Inspektorat); unsur pengawas eksternal dari Aparatur Penegak Hukum, BPKP dan BPK; serta dari unsur masyarakat desa itu sendiri. Hal ini akan dapat memastikan bahwa pelaksanaan Dana Desa akan optimal tanpa diciderai korupsi dari para pemangku kepentingan,

5. Selain rekomendasi kepada pemerintah, peran serta dan kepatuhan masyarakat dalam membantu pemerintah juga penting untuk merealisasikan kebijakan-kebijakannya yakni dengan bersedia menjadi objek utama dalam proses peningkatan pembangunan serta sumbangsih atas kritik dan saran yang membangun bagi pemerintah terhadap anggaran yang dialokasikannya, agar program kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan dalam pengelolaan keuangannya.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Beberapa keterbatasan penelitian yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan tentang kemiskinan secara total, diharapkan pada observasi mendatang dapat dipersempit dengan mengambil variabel kemiskinan di Desa ataupun di Kota agar mampu mengidentifikasi secara detail tentang permasalahan yang terjadi di Desa maupun di Kota, mengingat kedua lokus ini pasti akan ditemui kondisi yang berbeda baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, pembangunan, tingkat pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang memungkinkan juga akan mendapatkan cara dan strategi tersendiri dalam mengatasi permasalahan yang ada,
2. Penelitian dilakukan menggunakan variabel DAK secara total, pada penelitian selanjutnya dapat dipersempit lagi dengan menggunakan variabel DAK fisik ataupun non-fisik, dengan demikian pastinya akan mendapatkan hasil, kesimpulan dan saran secara khusus terhadap DAK agar kedepannya penyusunan kebijakan penggunaan DAK akan lebih tajam dalam menekan angka kemiskinan.